

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan jaman yang semakin lama semakin berkembang pesat dimana pelaporan akuntansi lebih banyak digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada pemilik modal sehingga perusahaan lebih berorientasi kepada pemilik modal sehingga hal-hal yang tidak berhubungan dengan pemilik modal kurang diperhatikan, bentuk kurang perhatiannya perusahaan kepada hal-hal yang tidak berhubungan dengan pemilik modal adalah melakukan pengeplorasian terhadap lingkungan dan tenaga kerja. Ketika banyak dilakukannya pengeplorasian lingkungan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan yang dapat berdampak pada terjadinya bencana alam. Bencana alam tersebut dapat terjadi karena beberapa perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kerusakan itu dapat diatasi apabila perusahaan dapat mempertanggungjawabkan pengaruh yang ditimbulkan oleh aktivitas yang dilakukannya dengan baik.

Dalam kenyataannya perusahaan tidak hanya dinilai dari kinerja keuangannya saja tetapi juga dinilai dari kinerja sosial perusahaan (*corporate social performance*), yaitu bagaimana perusahaan tidak hanya memuaskan para pemilik modal tetapi juga harus memuaskan seluruh *stakeholdernya*, merupakan

salah satu faktor yang menyebabkan mulai munculnya pandangan bahwa perusahaan harus melaksanakan aktivitas sosial, disamping aktivitas operasionalnya. Oleh karena banyaknya pandangan yang berfikir bahwa perusahaan tidak hanya melakukan aktivitas operasional melainkan juga aktivitas sosial, maka hal tersebut membuat banyak perusahaan yang melakukan aktivitas sosialnya atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Perkembangan *Corporate Social Responsibility (CSR)* juga terkait dengan semakin parahnya kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia maupun dunia, mulai dari penggundulan hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim. Banyaknya perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, maka pemerintah membuat peraturan yaitu Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas diterbitkan dan mewajibkan perseroan yang bidang usahanya terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Undang-undang tersebut (Pasal 66 ayat 2c) mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan tiap perusahaan. Pelaporan tersebut merupakan cermin bahwa diperlukannya akuntabilitas perseroan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga para *stakeholders* dapat menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. *Corporate Sosial Responsibility* dalam undang-undang tersebut (Pasal 1 ayat 3) dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan

lingkungan yang diartikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Nurkhin, 2009).

Berkembangnya tanggung jawab sosial perusahaan dan mulai munculnya peraturan pemerintah tentang tanggung jawab sosial, laporan tahunan sebagai salah satu media potensial bagi perusahaan untuk mengakomodasikan kepada *stakeholder* informasi yang dihasilkan dari transaksi yang dilakukan perusahaan. Ruang lingkup informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan semakin diperluas. Tidak hanya memberikan informasi keuangan konvensional yang sempit dan terbatas pada angka-angka akuntansi, tetapi laporan keuangan harus mengakomodasi kepentingan para pengambil keputusan dengan cara menampilkan pertanggungjawaban sosialnya, yang nantinya mampu menampilkan *performance* perusahaan secara lengkap. Perusahaan pun berusaha untuk menampilkan laporan keuangannya secara maksimal yang dapat berguna bagi para *stakeholdernya*.

Hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* merupakan perkembangan akuntansi pertanggungjawaban sosial. Akuntansi untuk pertanggungjawaban sosial merupakan perluasan dari pertanggungjawaban organisasi (perusahaan) di luar batas-batas akuntansi keuangan tradisional, yaitu menyediakan laporan keuangan tidak hanya kepada pemilik modal khususnya pemegang saham tetapi juga untuk para *stakeholder*

lain seperti masyarakat atau pelanggan maupun pemerintah. Perluasan ini didasarkan pada anggapan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih luas dan tidak sekedar mencari laba atau keuntungan untuk para pemegang saham.

Akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban mempunyai fungsi sebagai alat kendali terhadap aktivitas suatu unit usaha. Tanggung jawab manajemen tidak hanya terbatas atas pengelolaan dana dalam perusahaan kepada investor dan kreditor, tetapi juga meliputi dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan alam dan sosialnya. Keterkaitan yang terjadi antara perusahaan dengan lingkungan alam dan sosialnya, serta manfaat sosial (*social benefits*) dan biaya sosial (*social cost*) yang ditimbulkannya merupakan sisi aspek sosial pertanggungjawaban manajemen.

Perusahaan yang melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial mendapatkan keuntungan dari itu yaitu dapat meningkatkan citra perusahaan dimana perusahaan yang melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dapat memberikan nilai tambah di mata para pemberi modal sehingga akan banyak pemberi modal yang menanamkan saham pada perusahaan yang melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini juga memotivasi beberapa perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar dalam laporan keuangan tahunan, laporan lingkungan tersendiri dan website perusahaan. Selain itu pengungkapan tanggung jawab sosial juga dapat menjadi keunggulan kompetitif dengan perusahaan yang telah

melakukan pengungkapan sehingga dapat memotivasi perusahaan yang belum melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Tanggung jawab sosial merupakan wujud dari hubungan baik yang terjalin antara perusahaan dan *stakeholder* dimana perusahaan telah dapat melakukan kewajibannya terhadap *stakeholder* dan lingkungan. Sehingga hak-hak *stakeholder* pun dapat terpenuhi dengan baik.

Dalam pertanggungjawaban sosial bukan hanya perusahaan yang memberikan efek negatif terhadap lingkungan seperti perusahaan manufaktur atau industri tetapi juga sektor-sektor lain seperti perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, asuransi, komunikasi, lembaga keuangan bank dan bukan bank diharapkan juga melakukan tanggung jawab sosial. *World Bank* (2004) mendefinisikan *corporate social responsibility* sebagai komitmen perusahaan untuk berperan dalam kelangsungan pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan karyawan, keluarga mereka, masyarakat lokal, dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup, melalui aktivitas yang tepat bagi perusahaan dan bagi pengembangan.

Dalam sektor perbankan diharapkan tidak hanya melaksanakan tugas-tugas utama perbankannya yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, melainkan juga diminta untuk tetap memiliki kepedulian terhadap lingkungan (komunitas) sebagai wujud *corporate social responsibility*nya walaupun perusahaan ini tidak memberikan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Bank Dunia menyatakan bahwa tanggung jawab sosial terdiri dari

beberapa komponen utama: perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak azasi manusia, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan pendidikan, bantuan bencana kemanusiaan (Yuniarti, 2007).

Hal itulah yang mendorong beberapa bank di Indonesia untuk melaksanakan berbagai program atau kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan sosialnya. Di beberapa bank tanggung jawab sosial dalam bentuk pemberian dana untuk bidang pendidikan seperti mendirikan sekolah gratis dan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu. Di bidang kesehatan membuka klinik pemeriksaan gratis sedangkan di bidang lingkungan penanaman pohon-pohon. Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai bank tersebut mengindikasikan adanya kesadaran akan tanggung jawab etis, sosial dan tanggung jawab *discretionary* yaitu tanggung jawab yang semestinya tidak dilakukan tapi dilakukan atas kemauan sendiri.

Dalam penelitian terdahulu, Nurkhin (2009) menemukan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sitepu (2009) menemukan bahwa *leverage* memiliki tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk variabel ukuran dewan komisaris Sitepu (2009) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sabeni dalam Sitepu (2009) menemukan ukuran perusahaan secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan didukung dengan penemuan Marwata dalam Sitepu (2009) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Nofandrilla dalam Sitepu (2009) menemukan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Alasan dilakukannya penelitian adalah pertama, karena masih jarang penelitian yang menggunakan perusahaan perbankan kebanyakan penelitian dengan menggunakan perusahaan manufaktur. Di sini perbedaan tanggung jawab sosial di perusahaan manufaktur dan perusahaan perbankan adalah dalam perusahaan manufaktur tanggung jawab sosial muncul karena adanya dampak pengrusakan lingkungan akibat yang ditimbulkan perusahaan karena aktivitas yang dijalankan sedangkan perusahaan perbankan tanggung jawab sosial timbul karena kepedulian terhadap lingkungan sekitar dapat berupa beasiswa, penambahan energi untuk listrik dan pembangunan sekolah gratis. Kedua, karena ingin mengetahuinya apakah hasil dari penelitian dengan judul yang sama di perusahaan manufaktur memiliki hasil yang sama dengan penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan.

Berdasarkan uraian tersebut dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti akan mengangkat dan membahas permasalahan dengan judul:
”ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
2. Apakah tingkat *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
5. Apakah biaya sosial berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
6. Apakah umur perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Menganalisis apakah tingkat *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Menganalisis apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
4. Menganalisis apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

5. Menganalisis apakah biaya sosial berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
6. Menganalisis apakah umur perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bidang Teoritis

Hasil penelitian memberikan perkembangan ilmu bukan hanya pada akuntansi keuangan saja melainkan pada akuntansi manajemen dan akuntansi perilakunya tentang konsep atau teori tanggung jawab sosial dan pengungkapannya serta faktor-faktor pada perusahaan yang mempengaruhi pengungkapan tersebut.

2. Bidang Praktisi

Manfaat penelitian ini dalam bidang praktisi adalah:

a. Perusahaan

Memberikan masukan untuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

b. Manajer

Untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan.

c. *Stakeholder*

Sebagai nilai tambah dalam menilai suatu perusahaan.